

Judul : Rezim impor beras kembali lagi?
Tanggal : Rabu, 02 Nopember 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Rezim Impor Beras Kembali Lagi?

Prof. Tjipta Lesmana
Pengamat Ketahanan Pangan

MASALAH beras belakangan ini mencuat lagi karena adanya kabar tentang kenaikan harga beras yang nyaris merata di seluruh Nusantara. Bukan hanya kenaikan harga, juga kabar tentang turunnya stok beras. Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membantah sinyalemen ini. "Kalau ada yang mengatakan begitu, silakan datang ke Pasar Induk Cipinang. Lihat dengan mata sendiri persediaan beras di sana!"

Menteri Perdagangan melansir pernyataan yang memprihatinkan. Padahal baru beberapa hari yang lalu BPS mengeluarkan data produksi beras kita kepada masyarakat, yakni tentang produksi padi kita yang meningkat. Tahun ini produksi padi kita bisa mencapai 55,67 juta ton GKG, naik 2,31% dibandingkan produksi tahun lalu. Kenaikan produksi padi ini terutama akibat kenaikan Luas lahan tanaman padi. Panen raya padi Jawa

Timur dari September sampai Desember diyakini bisa mencapai 1,15 juta ton; Jawa Tengah 1,01 juta ton; Jawa Barat 1,6 juta ton.

Hukum supply and demand mengajarkan, harga komoditas akan naik jika permintaan meningkat tanpa melihat faktor lain. Sebaliknya, jika penawaran (supply) yang meningkat, harga cenderung turun. Menteri Perdagangan pada waktu yang bersamaan mengatakan cadangan beras nasional menipis. Kenapa menurun terus? Dia tidak menguraikan. Padahal data terakhir BPS menunjukkan produksi padi meningkat 2,31 persen dibandingkan tahun 2021. Menjawab kenaikan harga beras, Menteri juga menolak anggapan stok beras di pasar-pasar induk menurun.

Aneh alias kontroversial kan pernyataan Zulkifli? Di satu sisi dia mengemukakan CBP menipis; di sisi lain dia menepis persediaan beras di pasar-pasar menurun. Yang benar yang mana?

Presiden Jokowi tampaknya gerah dan waswas juga



membaca atau mendengar berita-berita yang kurang pasti tentang masalah beras akhir-akhir ini. Maka 2-3 hari yang lalu Presiden memanggil sejumlah Menteri terkait masalah perberasan. Presiden memerintahkan semua pejabat terkait dengan perberasan, semua gubernur dan bupati untuk segera mengecek stok beras di daerah mereka masing-masing, apakah benar ada kekurangan atau masih stabil. Secara ti-

dak langsung, Jokowi ingin mengetahui apa penyebab pergerakan harga beras akhir-akhir ini.

Masalah beras tentu SANGAT SERIUS di negara kita karena praktis semua orang Indonesia makan nasi tiap hari. Tidak makan nasi terasa belum makan. Maka, stabilitas harga dan stok beras amat penting dijaga terus-menerus.

Jika benar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menipis, itu pertanda bahaya. CBP yang menipis hampir dipastikan akan mendorong kenaikan harga beras. Kenaikan harga beras yang terus-menerus pasti mengundang aksi-aksi unjuk rasa massal. Makin lama harga beras naik, makin besar aksi-aksi unjuk rasa. Itu sudah pasti. Dengan sendirinya, stabilitas nasional akan goyang.

Kenapa harga beras naik? Sari teori mengatakan ada tiga penyebabnya. Pertama, harga pupuk yang akhir-akhir ini meningkat. Kedua, pembatasan ke petani untuk menggunakan pupuk bersubsidi. Ketiga, ada

oknum-oknum pelaku usaha yang mendorong harga beras supaya naik. Jadi, "kambing hitamnya" harga pupuk yang diam-diam naik, dan kesulitan petani memakai pupuk bersubsidi. Faktor ketiga: ada oknum-oknum usaha tertentu yang sengaja "memainkan" harga beras dengan harapan pemerintah segera MENGIMPOR beras dalam jumlah memadai untuk menghekan kenaikan harga beras.

Kenapa pupuk yang dikambinghitamkan?

Komponen biaya pupuk sejalan ini tidak mengambil porsi besar dalam Analisis Usaha Tani (AUT). Porsi biaya pupuk dan sarana produksi lainnya (seperti benih dan pestisida), jika mau jujur tidak lebih besar dari 10 persen!

"Mafia impor beras" memang sudah lama bergerilya di negara kita, karena impor beras dapat merauk keuntungan SANGAT BESAR. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan kerap terjadi "perang" yang cukup keras. Tiga tahun yang lalu, tiba-

tiba seorang petinggi pemerintah memberitahakan pers bahwa Indonesia akan segera impor dua juta ton beras, masing-masing satu juta ton dari Thailand dan Vietnam. Padahal Presiden Jokowi Ketika itu sudah memberitahakan masyarakat bahwa hingga akhir tahun kita tidak akan impor beras; persediaan beras sangat cukup.

Toh, impor 2 juta ton beras jalan terus.

Apa akibatnya?

Hingga dua tahun setelah 2 juta ton beras yang masuk dari Thailand dan Vietnam datang belum juga dikonsumsi. Bulog bingung, bagaimana menyimpulkannya karena gudang-gudang sudah penuh. Sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan terang-terangan menolak keras menerima beras impor karena stok di daerah mereka dinyatakan lebih dari cukup.

Alhasil, Budi Waseso, Dirut Bulog ketika itu sampai menyatakan akan buang beras impor itu ke laut, karena Bulog mengeluarkan anggaran yang terlalu besar untuk sewa gudang-

gudang. Ketika itu saya sengaja menemui Menteri Pertanian. Satu pertanyaan saya ajukan: Kenapa Bapak tidak tahan impor beras ketika itu. Sebab, Menteri salah satu petinggi yang paling keras menyatakan pemerintah tidak perlu impor beras.

"Saya kalah suara dalam rapat terbatas sebelum impor beras dari Thailand dan Vietnam itu disetujui. Apa boleh buat, saya diam saja. Pak!"

Mungkinkah regime impor beras kini akan dihidupkan kembali dengan permainan menaikkan harga beras di pasar-pasar induk? Dengan menciptakan ketakutan pseudo bahwa kita akan kekurangan beras yang serius – dengan sendirinya harga beras akan membumbung lagi – jika tidak segera impor beras dalam jumlah memadai?

Presiden Jokowi, pikirkanlah secara cermat. JANGAN DIKIBULI oleh pelaku-pelaku usaha yang nakal yang hendak memancing air keruh di tengah argumentasi palsu bahwa cadangan beras pemerintah semakin tipis !!!